



Judul : Babak Baru Rencana Ibu Kota Baru
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

T A J U K

Babak Baru Rencana Ibu Kota Baru

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) memasuki babak baru. DPR mengambil keputusan menetapkan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam forum Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (18/1).

Sebelumnya, Pansus RUU IKN menggelar rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Dalam rapat tersebut disepakati, pemerintahan daerah khusus IKN akan setingkat provinsi, bukan kementerian. Wilayah ibu kota negara akan disebut otorita IKN. Kewenangan dan kekhususannya akan diatur dalam aturan turunan, yakni peraturan pemerintah (PP).

Dalam rapat tersebut, Suharso juga mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengungkapkan nama dari ibu kota negara baru untuk Indonesia. Nama yang akan dipakai adalah Nusantara. Alasan pemilihan Nusantara adalah diksi tersebut menggambarkan keberagaman dari Indonesia. Selain itu, diksi tersebut juga sudah menjadi nama yang ikonik di dalam negeri dan internasional.

Kepala Bappenas mengatakan, pengesahan tersebut tak serta-merta membuat pemindahan ibu kota negara langsung dilakukan. Ia mengatakan, pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dilakukan secara bertahap. Sebab, pelaksanaannya memperhatikan kesinambungan fiskal dan skema pendanaan.

Suharso mengatakan, pemerintah akan melakukan sejumlah skema pendanaan dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Beberapa di antaranya, kerja sama pemerintah dan badan usaha, ataupun BUMN dengan swasta. Ia pun meyakini bahwa pembangunan IKN ini tidak akan memberatkan anak cucu bangsa.

Dengan pengesahan RUU IKN, pembangunan IKN kini memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, langkah ke depan jauh lebih sulit dibandingkan pembahasan hukum.

Soal pembiayaan misalnya, menurut Suharso, proyek ini merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, BUMN, dan swasta. Dia menjamin proyek tidak akan membebani anak cucu kelak. Tapi selama yang digunakan adalah APBN tetap saja itu akan menjadi beban pada masa mendatang. Apalagi, jika dana pembangunan nanti diambil dari pinjaman pihak asing.

Memindahkan ibu kota negara tentu bukan pekerjaan gampang. Tidak hanya membangun secara fisik suatu tempat yang akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga membangun lingkungan, sosial, dan budaya.

Di sinilah kita berharap agar pemerintah tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berbau fisik, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan dengan pemindahan ibu kota. Kita tentu tak ingin ibu kota nanti hanya elok dipandang secara fisik, tapi tak mampu menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depan. Pemerintah harus menerima masukan banyak pihak yang berkompeten, agar proyek besar ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. ■